

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT DI DESA HANUM KECAMATAN DAYEUHLUHUR KABUPATEN CILACAP JAWA TENGAH

Lia Amelia¹, Endah Vestikowati², R. Rindu Garvera³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: liaamelia2403@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah sampai sekarang masih belum dikatakan berhasil dan belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun yang menjadi rumusah masalah, yaitu: Bagaimana efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: Efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang informan yaitu: 6 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT dan 4 orang Pemerintah Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, model data, serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Program BPNT di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah sampai sekarang masih belum dikatakan berhasil dan belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini terlihat dari ketidaktepatan penentuan waktu penyaluran program BPNT serta ketidaktepatan dalam kegiatan penentuan atau pendataan penerima manfaat program BPNT. Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan efektivitas program BPNT di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, diantaranya tingkat pemahaman masyarakat mengenai program BPNT masih rendah dan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu melakukan pendampingan dan edukasi serta arahan melalui kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi dan melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi yang lancar dengan berbagai stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyaluran program BPNT.

Kata Kunci: *Efektivitas, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kebutuhan Pangan.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kerentanan pangan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Serta dalam Pasal 34 ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945 juga dijelaskan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Saat ini telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pelaksanaan program BPNT

mulai dilaksanakan pada awal tahun 2017 yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 53 Tahun 2018 tentang Bantuan Sosial Pangan Provinsi Jawa Tengah, merumuskan bahwa : “Bantuan Sosial Pangan adalah bantuan social terkait pangan yang terdiri dari Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) “.

Dalam Pedoman Umum BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur. Besaran manfaat BPNT pada tahun 2021 adalah Rp 200.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. . Menurut Garis, R. R., & Desfirani, L. (2021). Bahwa permasalahan dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanganan dampak Pandemi COVID19. Ditemukan beberapa indikator permasalahan diantaranya yaitu pemutakhiran data yang

cenderung lambat, sehingga berdampak kepada tidak updatenya data yg dimiliki.

Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah merupakan salah satu desa yang melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berikut ini peneliti sajikan data mengenai jumlah penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah pada tahun 2021.

Tabel 1.1 Keluarga Penerima Manfaat BPNT Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Tahun 2021

No	Dusun	Jumlah KPM
1	Dusun Sudimampir	90
2	Dusun Sukaharja	101
3	Dusun Ciloa	54
4	Dusun Cisagu	31
5	Dusun Rimpaknangsi	64
6	Dusun Sukanagara	71
Jumlah		411

Sumber Data: Kantor Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur, 2021

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah sebanyak 411 keluarga. Sedangkan keluarga pra

sejahtera di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah sebanyak 808 keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat yang tergolong kedalam keluarga pra sejahtera yang mendapatkan manfaat dari program BPNT ini.

Hasil observasi awal diketahui pula bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah sampai sekarang masih belum dikatakan berhasil dan belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari indikator permasalahan yang terjadi di lapangan, diantaranya:

1. Belum tepatnya sasaran dalam penerimaan bantuan BPNT. Hal ini terlihat dengan tingkat akurasi data yang ada di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah masih rendah. Setelah dilakukan pencermatan data dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan dibagikan banyak ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat ini. Misalnya: masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai KPM, padahal layak. Sesuai dengan kriteria penerima BPNT bahwa salah satu kriterianya yaitu pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD,

tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak tamat SD tetapi tidak termasuk sebagai KPM. Adapula KPM yang sudah dianggap mampu oleh masyarakat tetapi masih mendapat KKS. Ada juga warga yang sudah pindah dan meninggal masih muncul sebagai penerima KKS. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengumpulan data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan program BPNT yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum optimal sehingga pemberian program BPNT di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah kurang tepat sasaran.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program BPNT. Masih banyak masyarakat penerima bantuan yang mengira bahwa program BPNT adalah program bantuan keuangan dengan nilai nominal Rp 200.000/KPM/bulan yang berbentuk uang *cash*. Sementara itu sesuai dengan ketentuan, nilai nominal tersebut tidak bisa diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur dan hanya bisa ditukarkan di *e-warong*.
3. Belum tercapainya tujuan dari adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Salah satu tujuan program BPNT menurut Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat di Desa Hanum khususnya KPM yang tergolong kedalam keluarga pra sejahtera. Dari 1.417 keluarga di Desa Hanum, masih ada 808 keluarga yang tergolong keluarga pra sejahtera dan hanya 411 keluarga yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Dengan demikian dapat diketahui masih terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program bantuan sosial yang diberikan pemerintah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Sehingga diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Berdasarkan dari uraian di atas maka peneliti menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul **“Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Desa Hanum Kecamatan**

Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah?”.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui: “Efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai manfaat positif dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan, khususnya mengenai efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan penelitian ini berguna untuk menambah

wawasan penelitian dan sebagai bahan kajian untuk pengembangan yang lebih mendalam dan lebih luas di masa yang akan datang di bidang Ilmu Pemerintahan terutama pada kebijakan pemerintahan, khususnya mengenai efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun koreksi bagi pemerintah khususnya aparatur di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, agar mampu melaksanakan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang ada.

c. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang akan memberikan penambahan wawasan mengenai efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Definisi efektif menurut Adisasmita (2011:39) yaitu: “Efektif merupakan perolehan

masuk dengan kualitas dan kuantitas sesuai sasaran yang telah ditetapkan”. Sedangkan pengertian efektivitas menurut Westra dkk dalam Adisasmita (2011:170) yaitu: “Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki”.

Menurut pendapat Makmur (2015:6) bahwa: “Efektivitas merupakan ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai”. Sedangkan Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Nawawi (2015:190) menyatakan bahwa: “Efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Menurut Pasolong (2007:4) menyatakan bahwa:

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang

telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Pengertian efektivitas menurut Kurniawan (2005:109), “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Sedarmayanti (2009:59) mendefinisikan konsep efektivitas sebagai berikut:

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah

bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila program dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Menurut Wirawan (2012:16) bahwa: “Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan melaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan tertentu bersifat umum untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program”.

Sementara itu, Kurniawan (2005:136), menyatakan bahwa: “Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan”.

Garvera (2016:85) berpendapat bahwa: “Program adalah suatu rencana tersusun yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. Sedangkan Vestikowati (2016:815) menyatakan bahwa:

Pelaksanaan suatu program merupakan suatu rencana, sikap, perbuatan, himpunan keputusan dan tindakan serta pengawasan yang terorganisir, untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui penggunaan sarana-sarana tertentu, meliputi suatu

waktu tertentu dengan melaluitahap-tahap tertentu.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Bantuan Sosial Pangan Provinsi Jawa Tengah, merumuskan bahwa:

Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk non tunai kepada KPM senilai Rp 200.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong yang bekerja dengan bank penyalur.

Adapun tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (2019:13) adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;

3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Sementara itu, manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai(2019:13- 14) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
4. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); dan
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan diadakannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program

atau kegiatan”. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Makmur (2015:7-9) berpendapat bahwa dari segi kriteria efektivitas, unsur-unsurnya antara lain:

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berpikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan sasaran

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan.

METODE

Metode penelitian membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah- langkah sistematis. Menurut Mardalis (2004:21) bahwa: “Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuai dengan langkah-langkah sistematis. metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan dalam

proses penelitian”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah- langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Margano (2010:2) menyatakan bahwa: “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan”. Sedangkan pengertian metode penelitian kualitatif menurut Margano (2010:1) yaitu bahwa: “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atau

menggambarkan berbagai situasi, kondisi, atau fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu secara mendalam. Metode deskriptif kualitatif dianggap sesuai dalam penelitian ini karena hasil dari penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dalam menggambarkan efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan sebanyak 10 orang yang meliputi: aparatur pemerintah, Keluarga Penerima Manfaat, dan e-warong. Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan atas pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan tujuan peneliti sebagai sumber informasi. Berkaitan dengan informan ini, Bungin (2013:23) menjelaskan bahwa: “Jumlah informan dalam penelitian kualitatif lebih tepat dilakukan sengaja (*purposive*) dan tidak

dipersoalkan jumlahnya, yang diperhatikan adalah penentuan informan terutama tentang tepat atau tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas fenomena yang diteliti”.

2. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi, peraturan- peraturan, data statistik, buku- buku, jurnal ilmiah, artikel, dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Ada beberapa metode yang dipilih untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Menurut Bungin (2013:115), “Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan”. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung melihat ke daerah penelitian seperti mengamati pelaksanaan program BPNT di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

2. Wawancara

Menurut Arikunto (2012:227), “Wawancara adalah percakapan

langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Menurut Bungin (2013:108), “Wawancara mendalam (*in-dept interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab seraya bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai”.

3. Dokumentasi

Menurut Bungin (2013:121), “Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial”. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar datanya yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang dapat mendukung suatu penelitian.

Penelitian ini melakukan pengolahan data dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu teknik menganalisis data yang dibagi menjadi tiga langkah dengan model Miles dan Huberman dalam Moleong (2014:250), yakni:

1. Reduksi Data

Sebuah bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Terdapat beberapa bagian selanjutnya dari reduksi

data, yaitu membuat rangkuman, membuat tema-tema, membuat gugus- gugus, membuat pemisahan- pemisahan, menulis memo-memo. Tujuan reduksi data adalah memudahkan dalam proses pemahaman.

2. Model Data

Suatu kumpulan informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyajian data dalam usahanya mendeskripsikan informasi yang tersusun untuk menarik kesimpulan sesuai dengan data yang telah direduksi dan disajikan ke dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan Tahap peneliti mengambil kesimpulan terhadap data yang telah direduksi kedalam laporan secara sistematis, dengan cara membandingkan, menghubungkan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, mampu menjawab permasalahan dan tujuan diadakannya penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu program bantuan sosial harus ditentukan atau direncanakan waktu atau jadwal pelaksanaannya agar program dapat terorganisir dengan baik. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap terkadang kurang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dimana dalam perencanaan, pelaksanaan program BPNT disalurkan setiap bulannya secara berkala. Namun dalam kenyataannya, waktu penyaluran program BPNT terkadang mengalami keterlambatan hingga disatukan dengan bulan selanjutnya.

Setiap program bantuan sosial harus sesuai antara kualitas dan kuantitas sasaran dalam artian anggaran yang tersedia sesuai dengan realisasi. Adapun besarnya dana atau anggaran untuk membeli sembako yang terdapat dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan harga sembako yang dijual di e-warong, karena harga sembako ditetapkan sesuai dengan Harga Ecerang Tertinggi (HET) yang berlaku di daerah Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Setiap program memiliki alat ukur. Adapun alat ukur untuk menilai pencapaian program BPNT yaitu dari tingkat kemiskinan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat kebutuhan gizi masyarakat, serta tingkat perekonomian masyarakat. Selain itu, pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk kelancaran proses pelaksanaan dan penyaluran BPNT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap kebijakan harus berujung kepada keputusan terbaik yaitu tepat dalam menentukan pilihan. Kriteria penerima manfaat program BPNT adalah masyarakat atau keluarga dalam kategori keluarga pra sejahtera. Namun karena data yang digunakan untuk

memilih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah data yang lama maka program BPNT dirasakan kurang tepat sasaran sehingga diperlukan adanya pendataan ulang oleh pemerintah desa setempat.

Kelebihan manusia yang satu dengan manusia lainnya sangat tergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Pemerintah sebagai implementor pelaksanaan program BPNT telah memahami mengenai program BPNT sedangkan masyarakat kurang memahami program BPNT dikarenakan kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Implementor yang melaksanakan suatu program merupakan faktor pendukung optimalisasi pencapaian tujuan dari program atau kebijakan tersebut. Pemerintah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Desa Hanum memiliki kemampuan dalam memberikan arahan kepada masyarakat dan instruksi kepada agen penyalur yaitu e-warong dan bank penyalur secara jelas.

Suatu program dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan kegiatan program BPNT yang telah dijalankan di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap belum tercapai sepenuhnya karena masih ada

masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat BPNT tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari program BPNT. Adapun langkah yang mendukung pencapaian tujuan program BPNT tersebut yaitu dengan komunikasi yang lancar dengan berbagai *stakeholders* yang berkaitan dengan pelaksanaan dan panyaluran program BPNT. Setelah dilaksanakannya langkah tersebut, hasil kegiatan program BPNT yang telah dijalankan di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yaitu dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. Namun terdapat hambatan dalam pelaksanaan program BPNT dimana tingkat pemahaman atau sumber daya manusia Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih rendah sehingga pemerintah melakukan upaya dengan memberikan pendampingan maupun arahan dalam kegiatan sosialisasi serta pertemuan kelompok penerima manfaat.

Suatu program harus memiliki sasaran yang tepat sehingga tujuan diadakannya program dapat tercapai dengan optimal. Program BPNT di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap telah ditujukan kepada sasaran yang konkrit yaitu masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah sehingga dengan program BPNT dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan

kebutuhan pangan dan pemenuhan gizi yang seimbang. Adapun hambatan yang dialami dalam penyaluran BPNT yaitu tingkat pemahaman masyarakat yang rendah sehingga proses penyaluran BPNT menjadi kurang lancar, karena hal tersebut pemerintah melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara, proses dan tahapan penyaluran BPNT.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah sampai sekarang masih belum dikatakan berhasil dan belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini terlihat dari ketidaktepatan penentuan waktu penyaluran program BPNT yang sering mengalami keterlambatan serta ketidaktepatan dalam kegiatan penentuan atau pendataan penerima manfaat program BPNT karena masih ada beberapa masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi tidak terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Meski demikian ada beberapa hal mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang dapat dikatakan berhasil dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, yaitu berkaitan dengan: ketepatan perhitungan harga sembako yang ditetapkan e-warong telah sesuai

dengan Harga Eceran Terendah (HET) yang berlaku di daerah Kabupaten Cilacap, pemerintah yang bertugas dan berkaitan dengan pelaksanaan serta penyaluran program BPNT memiliki tanggung jawab yang tinggi yaitu dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran program BPNT di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap serta memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai program BPNT sehingga dapat memberikan arahan maupun instruksi secara jelas kepada masyarakat.

Selain itu terdapat beberapa hambatan dalam meningkatkan efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, diantaranya tingkat pemahaman masyarakat mengenai program BPNT masih rendah dan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Meskipun demikian, Dinas Sosial Kabupaten Cilacap beserta Pemerintah Desa Hanum tetap berupaya untuk meningkatkan efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, diantaranya melakukan pendampingan dan edukasi serta arahan melalui kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi dan melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi yang lancar dengan berbagai *stakeholders* yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyaluran program BPNT.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai berikut: Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah sampai sekarang masih belum dikatakan optimal dan belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya ketidaktepatan sasaran dalam memberikan bantuan BPNT juga ketidaktepatan sasaran dalam penentuan waktu penyaluran program BPNT yang sering mengalami keterlambatan serta ketidaktepatan dalam kegiatan penentuan atau pendataan penerima manfaat program BPNT karena masih ada beberapa masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi tidak terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Termasuk juga tingkat pemahaman masyarakat mengenai program BPNT masih rendah dan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap beserta Pemerintah Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, diantaranya yaitu melakukan pendampingan dan edukasi serta arahan melalui kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi dan melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi yang lancar dengan berbagai *stakeholders* yang

berkaitan dengan pelaksanaan dan penyaluran program BPNT.

Adapun saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Cilacap beserta Pemerintah Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap diharapkan dapat mengupayakan pendistribusian program BPNT di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap agar berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga tidak ada keterlambatan pendistribusian dan sesuai dengan indikator tepat waktu.
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Cilacap beserta Pemerintah Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap diharapkan mampu memberikan sosialisasi secara berkala guna mengubah *mindset* masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang hak dan kewajiban KPM BPNT sesuai peraturan yang berlaku.
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Cilacap beserta Pemerintah Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap diharapkan mampu memperbaiki pendataan penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui survey lapangan agar data penerima bantuan akurat dan

bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat diketahui program mana yang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan dicari bentuk sinergi atau kombinasi diantaranya agar efektivitas dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan lebih tinggi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Garvera, R. Rindu. 2016. Evaluasi Program Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Modern dan Demokratis MODERAT*. Volume 2 Nomor 2 Halaman 79-98.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Kosep, Teori dan Isu*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Margano. 2010. *Metodologi Penelitian Tindakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi: Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Edisi 1 Cetakan 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Garis, R. R., & Desfirani, L. (2021). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai*

- dalam *Penanganan Dampak Covid-19*. Musamus *Journal of Public Administration*, 4(1), 47-56.
- Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia.
- Vestikowati, Endah. 2016. Pelaksanaan Program Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia oleh Pemerintah Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Jurn Ilmiah Ilmu Pemerintahan MODERAT*. Volume 2 Nomor 2 Halaman 813-821.
- Wahab, Abdul Solihin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Dokumen Perundang-undangan :**
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Bantuan Sosial Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai. 2019. Cetakan Pertama. Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.